

# Peran PKn dalam Membentuk Budaya Anti-Perundungan di Lingkungan Sekolah Dasar

Ratna Kartika Sari<sup>1</sup>, Abdul Gofur<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Kompleks Islamic Centre, Jl. G. Obos, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112, Indonesia

Email: [ratnakartikasariii@gmail.com](mailto:ratnakartikasariii@gmail.com)

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p><i>Sejarah Artikel:</i>            Diterima: 14 Februari 2025            Direvisi: 24 April 2024            Disetujui: 15 Mei 2025  <u>Tersedia Daring: 1 Juni 2025</u></p> <p>Kata Kunci:            Budaya Anti Perundungan            Guru            Pendidikan Karakter            PKn            Sekolah Dasar</p>	<p>Perundungan di lingkungan sekolah dasar merupakan tantangan serius dalam dunia pendidikan yang berdampak negatif terhadap perkembangan karakter dan psikologis siswa. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki potensi strategis dalam mencegah perundungan melalui penanaman nilai-nilai demokrasi, toleransi, empati, dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran PKn dalam membentuk budaya anti-perundungan di sekolah dasar dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari berbagai literatur akademik dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembelajaran PKn berbasis nilai mampu menumbuhkan kesadaran moral siswa terhadap pentingnya hidup damai dan menghargai perbedaan. Guru PKn berperan signifikan sebagai teladan dalam menginternalisasikan nilai-nilai antiperundungan melalui strategi pembelajaran kontekstual. Selain itu, program "Roots" dari Kemendikbudristek dan UNICEF yang melibatkan siswa sebagai agen perubahan memperkuat sinergi antara pendidikan karakter dan pembelajaran kewarganegaraan. Dengan demikian, PKn berkontribusi besar dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari perundungan.</p>

ABSTRACT
<p><i>Keywords:</i> <i>Bullying in elementary school environments is a serious challenge in education that negatively impacts students' character development and psychological well-being. Civic Education (PKn) holds strategic potential in preventing bullying by instilling values of democracy, tolerance, empathy, and social responsibility. This study aims to examine the role of PKn in fostering an anti-bullying culture in elementary schools through a library research method. Data were collected from various academic literature and analyzed descriptively and qualitatively. The findings indicate that value-based PKn learning can raise students' moral awareness about the importance of living peacefully and respecting differences. Civic Education teachers play a significant role as role models in internalizing anti-bullying values through contextual learning strategies. Furthermore, the "Roots" program by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek) and UNICEF, which involves students as agents of change, strengthens the synergy between</i></p>



*character education and civic learning. Thus, PKn contributes greatly to creating a safe, inclusive, and bullying-free school environment.*

© 2025, Ratna Kartika Sari, Abdul Gofur  
This is an open access article under CC BY-SA license  
 

How to Cite: Sari, R. K., & Gofur, A. (2025). Peran PKn dalam Membentuk Budaya Anti-Perundungan di Lingkungan Sekolah Dasar. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 5(1), 23-29.  
<https://doi.org/10.47200/aossagcj.v5i1.2831>

## 1. Pendahuluan

Perundungan atau bullying merupakan fenomena yang masih marak terjadi di lingkungan pendidikan, khususnya pada jenjang sekolah dasar. Bentuk-bentuk perundungan seperti ejekan, pengucilan, hingga kekerasan fisik kerap ditemukan dalam interaksi antarsiswa. Kondisi ini tidak hanya mengganggu proses belajar mengajar, tetapi juga berdampak serius terhadap perkembangan karakter dan psikologis anak. Dalam tahap usia sekolah dasar yang merupakan fase pembentukan nilai-nilai moral dan sosial, perundungan dapat menghambat pertumbuhan sikap empati, toleransi, dan rasa aman dalam berinteraksi (Arfah & Wantini, 2023).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, kebhinekaan, tanggung jawab sosial, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Mata pelajaran ini tidak hanya berfokus mengembangkan pengetahuan kewarganegaraan secara kognitif, tetapi juga membentuk sikap dan keterampilan yang mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan beradab (Istianah *et al.*, 2024). Selain membahas konsep-konsep kenegaraan dan hak-hak warga negara, mata pelajaran ini juga menanamkan nilai-nilai dasar yang relevan dengan kehidupan sosial siswa, seperti sikap saling menghargai, toleransi, empati, tanggung jawab, dan kesadaran akan pentingnya hidup bersama secara damai (Lubis, 2020). Materi-materi dalam PKn mulai dari norma dalam masyarakat, nilai-nilai Pancasila, hingga pentingnya musyawarah dan demokrasi dapat menjadi alat efektif dalam membentuk karakter siswa yang anti-perundungan. Dengan demikian, PKn memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai media dalam membangun budaya anti-perundungan di sekolah baik secara teoritis dan praktik.

Peran guru PKn dalam mencegah perundungan juga sangat signifikan. Penelitian oleh (Azizah *et al.*, 2023) menemukan bahwa guru PKn yang berperan sebagai teladan, inspirator, dan motivator dapat mengurangi perilaku perundungan siswa hingga 45,6%. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam pembelajaran dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman. Selain itu, pendidikan karakter yang terintegrasi dalam PKn berkontribusi dalam membentuk budaya sekolah yang menolak perundungan. penelitian oleh (Nursehah *et al.*, 2024) menyatakan bahwa penanaman nilai-nilai seperti empati dan toleransi melalui pendidikan karakter dapat mengurangi tindakan perundungan di sekolah. Dengan ini, pendekatan holistik yang menggabungkan pendidikan karakter dan kewarganegaraan diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan perundungan.

Program-program pemerintah juga mendukung upaya ini. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan UNICEF Indonesia telah menginisiasi program “Roots” yang melibatkan siswa sebagai agen anti-perundungan dan memberikan pelatihan kepada guru untuk menangani kasus perundungan. Program ini sejalan

dengan tujuan PKn dalam membentuk warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Kolaborasi antara sekolah dan keluarga juga penting dalam membentuk budaya anti-perundungan. Anggraini & Saripah, (2024) menekankan bahwa komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, serta pengajaran nilai-nilai moral di rumah, dapat membantu mencegah perilaku perundungan di sekolah dasar . Dengan demikian, sinergi antara pendidikan formal dan informal menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk budaya anti-perundungan di sekolah dasar melalui pendekatan kajian pustaka. Kajian ini akan menelusuri berbagai literatur dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, mengidentifikasi nilai-nilai kewarganegaraan yang mendukung sikap anti-perundungan, serta menganalisis potensi penerapannya dalam praktik pembelajaran PKn. Penelitian ini mengkaji integrasi pendidikan kewarganegaraan dengan program sekolah ramah anak sebagai pendekatan holistik untuk pencegahan perundungan.

Survei literatur menunjukkan bahwa PKn berkontribusi dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang sangat relevan dalam mencegah bullying. Dalam penelitian oleh (Humaeroh & Dewi, 2021), pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi berperan besar dalam pembentukan karakter siswa agar memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan moralitas. Di sisi lain, Wahab Abdul Aziz menjelaskan bahwa PKn merupakan wahana strategis untuk membangun warga negara yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Pembelajaran PKn yang kontekstual dan berorientasi nilai diyakini mampu menjadi benteng utama dalam mencegah tindakan bullying melalui internalisasi sikap saling menghargai dan empati terhadap sesama (Widiatmaka, 2023).

Berangkat dari uraian di atas, kajian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mempertegas urgensi dan potensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai instrumen strategis dalam membentuk budaya anti-perundungan di lingkungan sekolah dasar, serta memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan praktik pembelajaran yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan kebhinekaan.

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data dalam penelitian ini bersumber dari literatur relevan berupa buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan pendidikan yang membahas peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk budaya anti-perundungan di sekolah dasar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber akademik yang dapat diakses secara daring maupun luring dari database terpercaya seperti Google Scholar, DOAJ, dan Garuda. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan cara mengorganisasi, menginterpretasi, dan mensintesis informasi dari berbagai literatur untuk menemukan simpulan yang relevan dengan fokus kajian. Proses analisis bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola pemikiran, konsep kunci, dan keterkaitan antar gagasan yang relevan dengan fokus kajian. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merumuskan interpretasi teoritis mengenai peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mendorong internalisasi nilai-nilai anti-perundungan di lingkungan pendidikan dasar. Validitas data dijaga melalui seleksi sumber serta verifikasi lintas literatur untuk menjamin akurasi dan kedalaman analisis.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar memiliki signifikansi strategis dalam membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku peserta didik yang berorientasi pada nilai-nilai

demokrasi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Istianah *et al.*, 2024). Melalui PKn, peserta didik diperkenalkan pada konsep-konsep dasar mengenai kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk nilai-nilai luhur Pancasila sebagai panduan etis dalam interaksi sosial. Dalam konteks ini, PKn berfungsi sebagai instrumen pedagogik yang menjembatani pembentukan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial yang esensial untuk mencegah munculnya perilaku menyimpang seperti perundungan.

Perundungan atau *bullying* merupakan perilaku yang dapat merugikan korban baik secara fisik, emosional, maupun psikologis (Rizqi *et al.*, 2024). Bentuk-bentuk perundungan sering kali terjadi di berbagai tempat seperti sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sosial lainnya. Ada beberapa bentuk perundungan yang sering terjadi, di antaranya (Sofyan *et al.*, 2022):

1. Dilihat dari kontak pelaku dengan korban:
  - Langsung: Perilaku menyerang yang tampak dan dapat diamati terhadap korban.
  - Tidak langsung: Perilaku yang dilakukan secara diam-diam, rahasia, tidak tampak.
2. Perundungan Fisik: Bullying yang kasat mata dan dapat dilihat oleh siapa saja karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dan korban.
3. Perundungan Verbal: Jenis bullying yang dapat terdeteksi karena bisa tertangkap oleh indra pendengaran.
4. Perundungan Mental: Jenis bullying yang paling berbahaya karena tidak dapat langsung tertangkap oleh mata atau telinga, kecuali jika kita cukup awas untuk mendeksninya.

PKn yang dirancang dengan pendekatan nilai (*value-based approach*) menjadi kunci dalam internalisasi norma sosial yang mendukung pembentukan budaya anti-perundungan. Model pembelajaran ini mendorong siswa untuk tidak hanya memahami secara teoritis konsep anti-kekerasan, tetapi juga merefleksikan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Strategi seperti studi kasus, simulasi pemecahan konflik, dan diskusi terbimbing dapat digunakan guru PKn untuk membentuk kesadaran kritis siswa terhadap dampak negatif bullying dan pentingnya menjaga kohesi sosial di lingkungan sekolah.

Penelitian oleh (Biyau, 2023) menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara intensitas pembelajaran PKn berbasis nilai dan penurunan insiden perundungan di sekolah dasar. Guru yang secara aktif menyisipkan isu-isu kekerasan sosial dalam materi PKn mampu meningkatkan sensitivitas siswa terhadap ketimpangan relasi kekuasaan dan ketidakadilan dalam interaksi sosial sehari-hari. Pembelajaran yang demikian menjadikan siswa tidak hanya sebagai penerima pengetahuan, tetapi juga sebagai subjek aktif yang memiliki daya reflektif dan keberanian moral dalam menghadapi praktik perundungan. PKn memberikan ruang bagi pengembangan kesadaran sosial melalui aktivitas yang melatih siswa membangun argumen, menghargai pendapat berbeda, serta bekerja dalam tim. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan demokratis yang tidak hanya mengedepankan transfer pengetahuan, tetapi juga sikap dan perilaku yang mendukung kehidupan bersama yang harmonis. Dengan demikian, PKn memiliki keunggulan dalam membentuk profil pelajar yang reflektif, partisipatif, dan berwawasan kemanusiaan.

Program-program pendukung seperti “*Roots*” yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek dan UNICEF Indonesia menjadi bentuk konkret sinergi antara nilai-nilai PKn dan praktik anti-perundungan di sekolah. Program ini mengajak siswa untuk menjadi agen perubahan dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Prinsip program ini sejalan dengan semangat PKn dalam membentuk warga negara yang aktif, peduli, dan bertanggung jawab secara sosial. Keberhasilan program anti-perundungan (*Roots*) dapat dilihat dari perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh para siswa. Perilaku siswa menjadi ukuran penting untuk menilai sejauh mana perkembangan dan keberhasilan pelaksanaan program dalam mencapai tujuan perubahan yang diinginkan (Efendi *et al.*, 2023).

Kurikulum PKn di tingkat sekolah dasar secara substansial mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila yang relevan dengan upaya pembentukan karakter antikekerasan. Sila kedua dan kelima, yakni “Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia,” merupakan dasar normatif yang dapat dijadikan titik tolak untuk membangun kesadaran siswa terhadap pentingnya menghormati martabat setiap individu dan menolak segala bentuk diskriminasi dan kekerasan (Hasoloan *et al.*, 2019). Penguatan implementasi kurikulum berbasis nilai ini menjadi prioritas dalam konteks pendidikan karakter nasional.

Implementasi pembelajaran PKn yang berkualitas menuntut kompetensi pedagogik dan afektif dari guru (Retnasari *et al.*, 2020). Guru PKn harus mampu memfasilitasi ruang dialogis yang mendorong siswa berpikir kritis, berani mengemukakan pendapat, serta mengembangkan kepekaan sosial terhadap ketimpangan yang terjadi di sekitar mereka. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam pembelajaran, bukan sekadar objek pasif yang menerima informasi. Peran guru sebagai *moral agent* menjadi krusial dalam proses transformasi karakter siswa menjadi pribadi yang beradab dan bertanggung jawab sosial (Judrah *et al.*, 2024).

Dukungan lingkungan sosial dan keluarga sangat menentukan keberhasilan penanaman nilai-nilai anti-perundungan yang diperoleh melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pendidikan karakter tidak dapat berdiri sendiri di dalam ruang kelas, melainkan perlu diperkuat melalui keteladanan yang konsisten di rumah dan lingkungan sosial siswa (Handayani *et al.*, 2020). Oleh karena itu, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas menjadi pendekatan yang berguna dalam menciptakan suasana sekolah yang bebas perundungan. Pembelajaran PKn yang holistik menuntut keterlibatan lintas sektor dalam membentuk budaya sekolah yang demokratis dan ramah anak.

Dalam konteks pencegahan perilaku perundungan, keluarga memegang peranan penting, khususnya melalui peningkatan ketahanan keluarga dan penguatan pola pengasuhan (Maemunah *et al.*, 2023), upaya tersebut dapat dilakukan melalui::

1. Tanamkan prinsip-prinsip agama pada individu dan ajari mereka untuk saling mencintai.
2. Ciptakan suasana kasih sayang sejak dini dengan mencontohkan cara berkomunikasi dengan anggota keluarga lainnya.
3. Membantu kaum muda membangun rasa percaya diri, membangun keberanian dan tekad, serta mengembangkan kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain.
4. Mengajari anak tentang etikat yang tepat terhadap orang lain dengan mengajari mereka keperdulian dan rasa hormat.
5. Mendampingi anak dalam menimba ilmu dasar dari berbagai media elektronik seperti televisi, internet, dan sumber elektronik lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Phillips, dalam (Taek, 2024), menekankan bahwa pendidikan karakter harus melibatkan seluruh pihak, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah membangun kembali jaringan pendidikan yang hampir terputus di antara ketiga lingkungan tersebut. Tanpa adanya kesinambungan dan keselarasan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, pembentukan karakter dan pendidikan watak tidak akan berjalan secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk budaya anti-perundungan di sekolah dasar melalui implementasi nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Melalui strategi pembelajaran yang kontekstual, reflektif, dan partisipatif, PKn menjadi instrumen efektif dalam pembentukan karakter siswa yang menjunjung tinggi martabat manusia. Oleh karena itu, optimalisasi implementasi PKn yang berbasis nilai dan penguatan kapasitas guru perlu menjadi fokus dalam kebijakan pendidikan karakter nasional sebagai upaya sistemik dalam menanggulangi perundungan di lingkungan sekolah secara berkelanjutan.

#### **4. Kesimpulan**

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar memiliki peran penting dalam membentuk budaya anti-perundungan melalui penguatan nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Melalui pendekatan pembelajaran berbasis nilai, PKn tidak hanya

mentransfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial kepada siswa. Peran aktif guru, sinergi antara sekolah, keluarga, dan komunitas, serta program pendukung seperti *Roots* menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Oleh karena itu, optimalisasi implementasi PKn dan penguatan kapasitas guru perlu menjadi prioritas dalam kebijakan pendidikan karakter untuk mencegah dan menanggulangi perundungan secara berkelanjutan di sekolah dasar.

## **5. Daftar Pustaka**

- Anggraini, D. R., & Saripah, I. (2024). Peranan Keluarga dalam Mencegah Perundungan pada Anak Usia Sekolah Dasar. *Journal of Community Empowerment*, 2(1), 25–32.
- Arfah, M., & Wantini, W. (2023). Perundungan di Pesantren: Fenomena Sosial pada Pendidikan Islam:(Studi Pada Pesantren Ulul Albab Tarakan). *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 12(2), 234–252.
- Azizah, S., Adha, M. M., & Putri, D. S. (2023). Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Mencegah Perilaku Bullying pada Siswa. *De Cive*, 3(3), 69–78.
- Biayu, H. (2023). *Peran Guru PPKn Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Integritas Sebagai Upaya Pencegahan Bullying di SMP Negeri 11 Kabupaten Sorong*. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
- Efendi, L., Syawaluddin, S., Yarni, L., & Santosa, B. (2023). Pengaruh Program Anti-Perundungan (Roots) terhadap Perubahan Perilaku Perundungan pada Siswa di SMP Negeri 1 Banuhampu, Kabupaten Agam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 11201–11219.
- Handayani, S., Sion, H., & Azahari, A. R. (2020). Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Manar Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat. *Journal of Environment and Management*, 1(2), 152–163.
- Hasoloan, J., Permana, I., Gunawan, M. S., Iskandar, H. Y., & Heryanto, Y. (2019). *Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Deepublish.
- Humaeroh, S., & Dewi, D. A. (2021). Peran pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi dalam pembentukan karakter siswa. *Journal on Education*, 3(3), 216–222.
- Istianah, A., Darmawan, C., Sundawa, D., & Fitriasari, S. (2024). Peran pendidikan kebinekaan dalam pendidikan kewarganegaraan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang damai. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 9(1), 15–29.
- Judrah, M., Arjum, A., Haeruddin, H., & Mustabsyirah, M. (2024). Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Karakter Peserta Didik Upaya Penguatan Moral. *Journal of Instructional and Development Researches*, 4(1), 25–37.
- Lubis, M. A. (2020). *Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan:(PPKN) DI SD/MI: Peluang Dan Tantangan Di Era Industri 4.0*. Prenada Media.
- Maemunah, M., Sakban, A., & Kuniati, Z. (2023). Peran Guru PPKn Melalui Pembimbingan Intensif Sebagai Upaya Pencegahan Bullying di Sekolah. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 11(1), 43–50.
- Nursehah, A., Rohayati, Y., Al-Muyassaro, M. A., & Hidayani, S. (2024). PERAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MENCEGAH BULLYING DI SEKOLAH. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10), 7923–7931.

- Retnasari, L., Hidayah, Y., & Dianasari, D. (2020). Urgensi Bahan Ajar Materi Pembelajaran Ppkn SD untuk Membangun Kompetensi Pedagogik Calon Guru Sekolah Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 6(2), 455139.
- Rizqi, S. A., Salsabila, S., Hafiansyah, M. B., & Rosyidi, M. (2024). Strategi Islam dalam pencegahan bullying anak-anak sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(4), 15.
- Sofyan, F. A., Wulandari, C. A., Liza, L. L., Purnama, L., Wulandari, R., & Maharani, N. (2022). Bentuk bullying dan cara mengatasi masalah bullying di sekolah dasar. *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, 1(04), 496–504.
- Taek, E. (2024). Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Karakter Anak Di Rumah Terhadap Perilaku Sosial Di Sekolah. *Jurnal Teologi Injili Dan Pendidikan Agama*, 2(1), 79–87.
- Widiatmaka, P. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Membangun Warga Negara yang Baik dan Mengantisipasi Krisis Karakter Pemuda. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 5(1), 7–18.